

Implementasi penagihan pencairan piutang PBB-P2 oleh badan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of billing disbursement implementation of PBB-P2 receivables by regional tax and retribution agency BPRD in DKI Jakarta Province

Rindi Lestari Suci Sofiyana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476737&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Nama : Rindi Lestari Suci Sofiyana
Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul : Analisis Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB-P2 Oleh Badan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Provinsi DKI Jakarta
Pembimbing : Dr. Inayati M.Si
Tesis ini membahas tentang kebijakan Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB- P2 oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penagihan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan masih banyak data piutang yang belum valid dan tidak clear, jumlah SDM yang ada masih kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif dikarenakan jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak, serta masih kurang kompeten petugas pajaknya dikarenakan Tupoksi yang tidak jelas pembagiannya dan juga aturan yang ada kurang mendukung pelaksanaan dalam penagihan. Kondisi ini membuat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang optimal. Selain itu penagihan yang dilakukan masih tergolong kedalam penagihan pasif. Kata Kunci: PBB-P2, Implementasi Kebijakan, Penagihan Pencairan Piutang

<hr />

ABSTRACT

Name Rindi Lestari Suci Sofiyana
Study Program Tax Policy and Administrative Science
Title Analysis of Billing Disbursement Implementation of PBB P2 Receivables by Regional Tax and Retribution Agency BPRD In DKI Jakarta Province
Counsellor Dr. Inayati M.Si
The focus of this study is the Implementation Policy of Billing Disbursement of PBB P2 Receivable by Regional Tax and Retribution Agency BPRD in DKI Jakarta Province 2018. This research uses post positivist approach, qualitative method, data collection using in depth interview technique. The results of the analysis in this study states that the implementation of billing policy is done less than the maximum because there are still a lot of data receivables that are not valid and not clear, the number of human resources are still insufficient to be able to carry out billing effectively due to the amount of delinquent and tax object to be billed enough, and still less competent tax officers due to unclear Tupoksi division and also existing rules are less support implementation in billing. This condition makes the performance performed by the local government is less than optimal. In addition, billing is still classified into passive billing. Key words PBB P2, Policy Implementation, Receivables Collection